



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DODY ANDOHAR JAYA SINAGA, S.H, M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI WAY KANAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. KUNTADI, S.H, M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blambangan Umpu, 15 Januari 2025,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
LAMPUNG.

(Dr. KUNTADI, S.H, M.H)

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
WAY KANAN,

(DODY ANDOHAR JAYA SINAGA, S.H, M.H)

**PERJANJIAN KINERJA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI WAY KANAN
TAHUN 2025**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyuluhan Hukum	Indeks Kepuasan Masyarakat	94%
2	Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Transformasi Sistem Penuntutan	Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Umum yang Memenuhi Prinsip Keadilan	90%
		Penanganan Perkara Pidana Khusus dan TPPU yang Memenuhi Prinsip Keadilan	90%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
3	Meningkatnya Efektivitas Penyelamatan dan Pemulihan Aset serta Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara	Tingkat Keberhasilan Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara	90%
		Tingkat Penyelesaian Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana dan Perdata	90%
4	Menguatnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan dan Akuntabel	Nilai Evaluasi Internal SAKIP	95%
		Nilai Kinerja Anggaran	95%

No	Program	Anggaran
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp1.203.306.000
2	Program Dukungan Manajemen	Rp7.312.657.000
Jumlah		Rp8.515.963.000

D. PRIORITAS NASIONAL

Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Blambangan Umpu, 15 Januari 2025.

Pihak Kedua,


KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
LAMPUNG,
(Dr. KUNTADI, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,


KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
WAY KANAN,
(DODY ANDOHAR JAYA SINAGA, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : WIKAN ADHI CAHYA, S.H
Jabatan : KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DODY A.J. SINAGA, S.H, M.H
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI WAY KANAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Way Kanan, Januari 2025

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA
USAHA NEGARA,

(WIKAN ADHI CAHYA, S.H)

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI WAY
KANAN,
(DODY A.J. SINAGA, S.H, M.H)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
KEJAKSAAN NEGERI WAY KANAN**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya keberhasilan Penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Persentase perkara Perdata yang diselesaikan melalui jalur Litigasi	50%
		Persentase perkara Perdata yang diselesaikan melalui jalur Non Litigasi	100%
		Persentase perkara Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui jalur Litigasi	50%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
2	Meningkatnya pengembalian dan penyelamatan keuangan Negara melalui jalur perdata	Persentase pengembalian dan penyelamatan keuangan negara melalui jalur perdata	100%
3	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	100%
4	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum perdata dan tata usaha negara	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pelayanan Hukum Gratis	Rp7.200.000
2	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Rp30.000.000
3	Pengelolaan Dana Desa	Rp24.000.000
4	Pendampingan Hukum	Rp13.200.000
5	Halo JPN	Rp6.000.000
	Jumlah	Rp80.400.000


D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

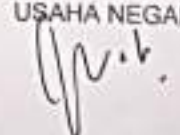
1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Way Kanan, Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI WAY
KANAN,

(DODY A. J. SINAGA, S.H, M.H)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA
USAHA NEGARA,

(WIKAN ADHI CAHYA, S.H)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RIFQI LEKSONO, S.H
Jabatan : KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DODY A.J. SINAGA, S.H., M.H
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI WAY KANAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blambangan Umpu, Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI WAY
KANAN,

(DODY A.J. SINAGA, S.H., M.H)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN
PENGELOLAAN BB

(RIFQI LEKSONO, S.H)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI
KEJAKSAAN NEGERI WAY KANAN

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset	Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara	80%
		Persentase penyelesaian pemulihan aset negara	80%
2	Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan terhadap penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset	80%

No	Kegiatan	Anggaran
1	PEMELIHARAAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN	Rp25.320.000
2	PEMUSNAHAN BARANG BUKTI	Rp22.680.000
3	PENYELESAIAN BARANG RAMPASAN	Rp19.500.000
Jumlah		Rp67.500.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Blambangan Umpu, Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI WAY
KANAN,

(DODY A.J. SINAGA, S.H., M.H)



Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN
PENGELOLAAN BB,

(RIFI LEKSONO, S.H)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : BERIZKI FARCHAN HANDHITAMA, S.H
Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DODY A.J. SINAGA, S.H, M.H
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI WAY KANAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blambangan Umpu, Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI WAY
KANAN,

(DODY A.J. SINAGA, S.H, M.H)

Pihak Pertama,
KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN,

(BERIZKI FARCHAN HANDHITAMA, S.H)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN KEJAKSAAN NEGERI WAY KANAN

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran kejaksaan RI	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95
2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Kejaksaan RI	Persentase sarana dan prasarana sesuai standar kebutuhan	95
3	Meningkatnya terlibat penyelenggaraan tata kelola aset	Tingkat pemenuhan inventarisasi dan pelaporan Barang Milik Negara	95

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
4	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum	Persentase kepuasan terhadap layanan hukum dari masing-masing Salkor	95

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Rp5.412.157.000
2	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp1.820.500.000
3	Layanan Umum	Rp30.000.000
4	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	Rp210.000.000
Jumlah		Rp7.472.657.000

D. PRIORITAS NASIONAL



E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Blambangan Umpu, Januari 2025

Pihak Pertama,

KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN,

(BERIZKI FARHAN HANDHITAMA, S.H)

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI WAY
KANAN,

(DODY A.J. SINAGA, S.H, M.H)





**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : JONI SAPUTRA, S.H.,M.H
Jabatan : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DODY A.J. SINAGA,S.H.,M.H
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI WAY KANAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blambangan Umpu, Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI WAY
KANAN,

(DODY A.J. SINAGA, S.H., M.H)

Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA
KHUSUS,

(JONI SAPUTRA, S.H., M.H)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN NEGERI WAY KANAN**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	Persentase tindak lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat	90%
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan	95%
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan	85%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
		Persentase Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan	85%
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	80%
		Persentase Perkara tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi	95%
		Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur Pidana Khusus	75%
2	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, (Kepabean, Cukai dan Pajak) dan TPPU secara transparan, akuntabel dan profesional	Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (kepabean, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan	0%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabean, Cukai, dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	0%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabean, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang telah dieksekusi	0%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penyelidikan	Rp92.082.000
2	Penyidikan	Rp206.000.000
3	Pra Penuntutan	Rp22.045.000
4	Penuntutan	Rp219.795.000
5	Eksekusi	Rp11.080.000
Jumlah		Rp551.002.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
		Persentase Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan	85%
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	80%
		Persentase Perkara tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi	95%
		Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur Pidana Khusus	75%
2	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU secara transparan, akuntabel dan profesional	Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan	0%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	0%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang telah dieksekusi	0%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penyelidikan	Rp92.082.000
2	Penyidikan	Rp206.000.000
3	Pra Penuntutan	Rp22.045.000
4	Penuntutan	Rp219.795.000
5	Eksekusi	Rp11.080.000
	Jumlah	Rp551.002.000

D. PRIORITAS NASIONAL

:

E. KINERJA TAMBAHAN


1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.

3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Blambangan Umpu, Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI WAY
KANAN,

(DODY A.J. SINAGA, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA
KHUSUS,

(JONI SAPUTRA, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : ARI CHANDRA PRATAMA, S.H
Jabatan : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DODY A.J. SINAGA, S.H., M.H
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI WAY KANAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blambangan Umpu, Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI WAY
KANAN



(DODY A.J. SINAGA, S.H., M.H)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM,

(ARI CHANDRA PRATAMA, S.H)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI WAY KANAN

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif	Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif	90%
2	Meningkatnya kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum	Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga Pra-Penuntutan	90%
		Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga Penuntutan	90%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
		Persentase perkara tindak pidana umum yang <i>in kracht van gewusdezaak</i> (Berkekuatan hukum tetap) yang telah dieksekusi	90%
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum bidang tindak pidana umum	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum bidang tindak pidana umum	95%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pra Penuntutan	Rp18.150.000
2	Penuntutan	Rp228.678.000
3	Eksekusi	Rp9.000.000
	Jumlah	Rp255.828.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Blambangan Umpu, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI WAY
KANAN,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM,



(BODY A. SINAGA, S.H., M.H)

(ARI CHANDRA PRATAMA, S.H)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RAHMAT EFFENDI, S.H., M.H
Jabatan : KEPALA SEKSI INTELIJEN

Selanjutnya disebut pihak pertama

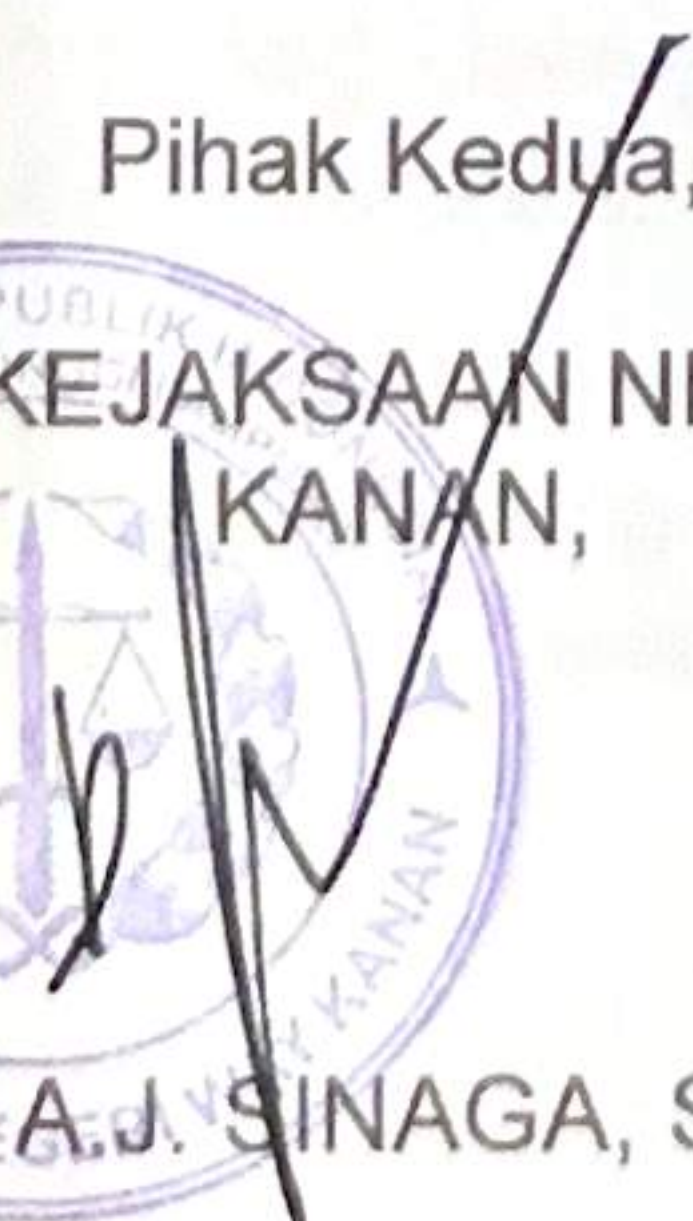
Nama : DODY A.J. SINAGA, S.H., M.H
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI WAY KANAN

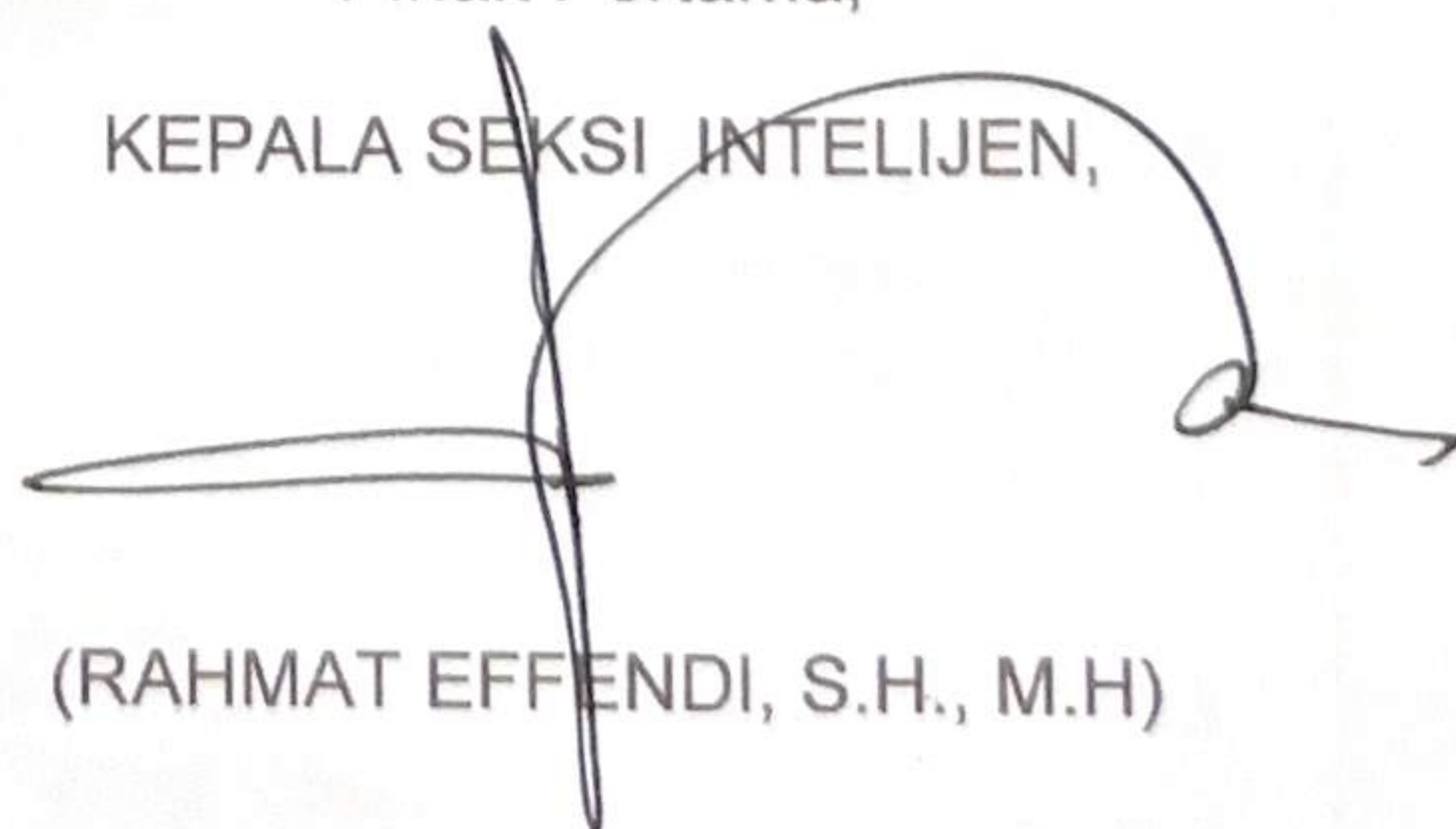
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blambangan Umpu, 30 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI WAY
KANAN,

(DODY A.J. SINAGA, S.H., M.H)

Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI INTELIJEN,

(RAHMAT EFFENDI, S.H., M.H)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI WAY KANAN

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan	Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan	80
2	Meningkatnya pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan	80
3	Meningkatnya pelaksanaan Operasi Intelijen yang	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan	80

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
	berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan	bidang ekonomi dan keuangan	
4	Meningkatnya kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	80
5	Meningkatnya operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen	80
6	Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum	Persentase lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum	80
7	Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan penyuluhan dan penerangan hukum	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan penyuluhan dan penerangan hukum	80

No	Kegiatan	Anggaran
1	LID/ PAM/ GAL	Rp16.000.000
2	Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat	Rp58.008.000
3	Penerangan Hukum	Rp38.976.000
4	Jaksa Masuk Sekolah	Rp26.000.000
5	Jaksa Menyapa	Rp26.400.000
6	Kampanye Anti Korupsi	Rp20.000.000
Jumlah		Rp185.384.000

D. PRIORITAS NASIONAL

Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.

E. KINERJA TAMBAHAN


1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.

3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Blambangan Umpu, 30 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI WAY
KANAN,

(DODY A.J. SINAGA, S.H., M.H)

Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI INTELIJEN,

(RAHMAT EFFENDI, S.H., M.H)